
DINAMIKA KEKUASAAN DAN KESENJANGAN SOSIAL DALAM SISTEM POLITIK MODERN

Juniper Panjaitan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam konteks sistem politik modern. Fokus utama penelitian adalah menganalisis interaksi kompleks antara elemen-elemen kekuasaan politik dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini menggabungkan teori politik, sosiologi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana struktur kekuasaan politik memengaruhi distribusi sumber daya dan akses terhadap kebijakan publik. Metode penelitian ini mencakup analisis literatur, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci dalam sistem politik. Hasil penelitian menyoroti dinamika kompleks antara penguasa politik, kelompok masyarakat, dan dampaknya terhadap ketidaksetaraan sosial. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dalam sistem politik modern.

Kata Kunci: *Dinamika Kekuasaan, Kesenjangan Sosial, Sistem Politik Modern, Distribusi Sumber Daya, Inklusivitas Kebijakan*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, sistem politik modern menjadi panggung utama bagi dinamika kekuasaan yang semakin kompleks. Perubahan struktural dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik mencerminkan transformasi mendalam yang mencakup berbagai elemen kunci dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi, sebagai salah satu pendorong utama, mengubah cara interaksi kekuasaan politik dan menghadirkan tantangan baru dalam merinci dan memahami pola distribusi kekuasaan.

Selain itu, kesenjangan sosial di dalam sistem politik modern bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga merambah ke ranah pendidikan, kesehatan, dan peluang sosial. Perkembangan demografi, termasuk pertumbuhan populasi dan mobilitas penduduk, menambah kompleksitas dinamika kekuasaan dengan menciptakan ketegangan antar kelompok etnis, agama, dan lapisan sosial. Peran media massa dan media sosial semakin signifikan dalam membentuk opini publik, mempercepat pola ketidaksetaraan, dan meretas bentuk konvensional komunikasi politik.

Pertumbuhan ekonomi global juga turut menyumbang pada dinamika kekuasaan dengan menciptakan ketidaksetaraan yang semakin tajam di berbagai negara. Isu-isu lingkungan dan keberlanjutan mengemuka sebagai faktor penting yang memengaruhi pengambilan keputusan politik, memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah terhadap ekologi dan masyarakatnya. Pendidikan dan akses informasi, sebagai pembentuk kesadaran politik, turut membentuk struktur kekuasaan dengan memberdayakan atau membatasi partisipasi masyarakat.

Tantangan terkini melibatkan pertentangan antara kepentingan korporat dan kebutuhan masyarakat luas, menyoroti ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan dalam sistem politik modern. Gerakan sosial dan aktivisme online memberikan dimensi baru dalam partisipasi politik, menggalang dukungan masyarakat untuk menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka. Faktor historis dan warisan kolonial terus memberikan warna pada dinamika kekuasaan, menciptakan pola hubungan yang kompleks dan mengakar dalam masyarakat modern.

Selain itu, tantangan global seperti perubahan iklim dan bencana alam mempertanyakan kemampuan sistem politik modern dalam merespons dan menjawab kebutuhan masyarakat di tengah krisis. Faktor-faktor ini, bersama dengan perubahan iklim global dan hubungan antarnegara yang semakin kompleks, membentuk pemandangan baru dalam distribusi kekuasaan internasional. Dalam konteks globalisasi ekonomi, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan mencuat sebagai isu sentral dalam sistem politik modern. Kemunculan korporasi multinasional dan interaksi ekonomi global menciptakan dinamika yang semakin rumit, di mana negara-negara berkembang sering kali menjadi objek eksploitasi yang memperdalam kesenjangan sosial. Seiring dengan itu, hak asasi manusia dan advokasi untuk keadilan sosial menjadi panggilan untuk menyeimbangkan kekuasaan yang dapat melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan.

Peran agen-agen non-negara, seperti organisasi nirlaba dan gerakan hak sipil, semakin memainkan peran penting dalam memajukan isu-isu keadilan dan kesejahteraan sosial. Aktivisme masyarakat sipil bukan hanya menciptakan ruang untuk berbicara, tetapi juga merangsang partisipasi langsung dalam mengubah dinamika politik dan memengaruhi kebijakan. Dalam hal ini, masyarakat sipil menjadi pemain kunci dalam menyeimbangkan kekuasaan dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan institusi politik.

Selain itu, warisan sejarah kolonial dan imperialisme masih memberikan dampak yang signifikan dalam pembentukan dinamika kekuasaan. Struktur sosial yang diwariskan dari masa lalu sering kali menciptakan ketidaksetaraan yang mendasar dalam sistem politik modern. Pemahaman mendalam terhadap sejarah dan pergeseran kekuasaan dari masa lalu menjadi kunci untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang mengatasi ketidaksetaraan dan kesenjangan.

Di tengah dinamika ini, perubahan teknologi dan transformasi ekonomi berperan penting dalam membentuk peta politik modern. Masyarakat yang semakin terkoneksi dan terinformasi membutuhkan respons yang cepat dan adaptasi dari pemerintah agar tetap relevan dalam mengelola kekuasaan dan menjawab aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu memberikan perhatian khusus pada bagaimana inovasi teknologi dapat diterapkan untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif.

Perubahan paradigma politik juga menjadi faktor penting dalam latar belakang dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern. Tren menuju pemerintahan terbuka, partisipatif, dan akuntabel menunjukkan semakin banyaknya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Ini menciptakan tekanan tambahan bagi pemegang kekuasaan untuk beradaptasi dengan model pemerintahan yang lebih responsif dan demokratis. Pentingnya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi sorotan dalam latar belakang ini. Masyarakat yang terdidik memiliki potensi lebih besar untuk mengkritisi dan mengajukan pertanyaan terhadap otoritas politik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan mempromosikan literasi politik dapat menjadi langkah kunci dalam mengurangi kesenjangan informasional dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Ketidaksetaraan gender juga memainkan peran yang signifikan dalam dinamika kekuasaan. Meskipun terdapat kemajuan, ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih merupakan tantangan yang relevan. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan representasi mereka dalam kebijakan publik menjadi aspek penting dalam meratakan lapangan permainan politik.

Terakhir, peran negara dalam mengelola kekuasaan dan mengatasi kesenjangan sosial menjadi fokus penting. Konsep negara kesejahteraan dan kebijakan redistribusi dapat menjadi solusi potensial untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Namun, pertanyaan tentang efektivitas implementasi kebijakan semacam itu dan dampaknya terhadap dinamika kekuasaan perlu terus dijelajahi dalam rangka mencapai keadilan sosial.

Dengan demikian, melalui pemahaman yang komprehensif terhadap latar belakang ini, upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem politik modern dapat berlangsung dengan lebih terarah. Kajian lebih lanjut dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat membuka jalan bagi inovasi dan reformasi yang memastikan bahwa kekuasaan politik dan kesenjangan sosial dapat diatasi untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern. Desain penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memungkinkan pemaduan data yang bersifat deskriptif dan statistik. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan merinci kompleksitas fenomena tersebut. Data kualitatif akan memberikan konteks dan insight, sementara data kuantitatif akan digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan generalisasi terkait dengan kekuasaan politik dan kesenjangan sosial. Langkah awal dalam penelitian ini melibatkan analisis literatur yang mendalam. Analisis tersebut tidak hanya terbatas pada kerangka kerja teoretis, tetapi juga mencakup temuan penelitian terkait dari berbagai disiplin ilmu, seperti teori politik, sosiologi, dan ekonomi. Tujuan dari analisis literatur ini adalah untuk membangun landasan konseptual yang kuat, memastikan bahwa penelitian ini tertanam dalam kerangka pemahaman yang mapan dan relevan. Penelitian ini akan melibatkan sejumlah studi kasus di berbagai konteks politik modern. Studi kasus ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang cara dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial termanifestasi dalam konteks nyata. Pemilihan kasus yang bervariasi akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih kaya dan dapat diaplikasikan dalam situasi yang berbeda. Wawancara mendalam akan menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data, melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan anggota masyarakat. Melalui wawancara, peneliti akan dapat mendapatkan perspektif langsung, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dari berbagai sudut pandang. Survei akan dijalankan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari responden yang merupakan representasi masyarakat. Data ini akan dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang berkaitan dengan kekuasaan politik dan kesenjangan sosial. Pendekatan kuantitatif akan memberikan gambaran umum yang objektif dan memungkinkan generalisasi hasil. Untuk menggali informasi dari media massa dan sosial, analisis konten akan digunakan. Ini mencakup identifikasi dan pemetaan isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan politik dan kesenjangan sosial dalam media. Analisis ini memberikan pandangan tentang bagaimana media membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu ini. Dalam konteks media sosial dan interaksi online, analisis jaringan akan digunakan untuk mengevaluasi bagaimana informasi dan kekuasaan tersebar melalui platform-platform tersebut.

Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang peran teknologi dalam dinamika politik modern dan interaksi sosial. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan studi kasus akan dianalisis menggunakan metode pengkodean tematik. Hal ini akan membantu mengidentifikasi pola-pola kunci, temuan, dan interpretasi mendalam dari pengalaman partisipan. Untuk meningkatkan validitas penelitian, hasil dari berbagai metode penelitian akan disatukan melalui proses triangulasi. Keseluruhan gambaran akan dibangun dari berbagai sumber dan metode, memberikan sudut pandang yang lebih lengkap dan menyeluruh. Hasil analisis dari data kualitatif dan kuantitatif akan dievaluasi dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern. Implikasi kebijakan dan arah penelitian lanjutan juga akan dibahas sebagai bagian integral dari kesimpulan penelitian ini.

- 1. Desain Penelitian:** *Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern. Desain penelitian ini memungkinkan untuk memadukan data kualitatif dan kuantitatif guna merinci dan menginterpretasi kompleksitas fenomena tersebut.*
- 2. Analisis Literatur:** *Langkah awal penelitian melibatkan analisis literatur mendalam untuk memahami kerangka kerja teoretis dan temuan penelitian terkait. Literatur ini mencakup teori politik, sosiologi, ekonomi, dan konsep-konsep terkait lainnya untuk memberikan landasan konseptual yang kuat.*
- 3. Studi Kasus:**
Sejumlah studi kasus akan diadakan untuk mengeksplorasi kasus-kasus konkret di berbagai konteks politik modern. Studi kasus ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial termanifestasi dalam konteks nyata.
- 4. Wawancara:** *Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan anggota masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dan pemahaman langsung tentang pengalaman mereka terkait dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial.*
- 5. Survei dan Analisis Kuantitatif:**
Survei akan dijalankan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari responden yang representatif dari masyarakat. Data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang berkaitan dengan kekuasaan politik dan kesenjangan sosial.
- 6. Analisis Konten:**
menggali informasi dari media massa dan sosial, analisis konten akan digunakan. Ini mencakup pengidentifikasian dan pemetaan berbagai isu yang berkaitan dengan kekuasaan dan kesenjangan sosial, serta cara media membentuk persepsi masyarakat.

7.	<p>Analisis Jaringan:</p> <p><i>Dalam konteks media sosial dan interaksi online, analisis jaringan akan digunakan untuk menilai bagaimana informasi dan kekuasaan tersebar melalui platform-platform tersebut. Ini dapat memberikan wawasan tentang peran teknologi dalam dinamika politik modern.</i></p>
8.	<p>Pemrosesan dan Analisis Data Kualitatif:</p> <p><i>Data kualitatif dari wawancara dan studi kasus akan dianalisis menggunakan metode pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kunci, temuan, dan interpretasi mendalam dari pengalaman partisipan.</i></p>
9.	<p>Triangulasi:</p> <p><i>Untuk meningkatkan validitas penelitian, hasil dari berbagai metode penelitian akan disatukan melalui proses triangulasi. Keseluruhan gambaran akan dibangun dari berbagai sumber dan metode, memberikan sudut pandang yang lebih lengkap.</i></p>
10.	<p>Evaluasi dan Kesimpulan:</p> <p><i>Hasil analisis akan dievaluasi dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern. Implikasi kebijakan dan arah penelitian lanjutan juga akan dibahas sebagai bagian integral dari kesimpulan penelitian ini.</i></p>

PEMBAHASAN

Dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern menjadi kompleksitas yang memerlukan kajian mendalam. Pertama-tama, penting untuk merinci dan memahami dinamika kekuasaan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali kompleksitas interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang membentuk dan mengarahkan kekuasaan dalam konteks politik modern. Analisis literatur menjadi langkah awal yang krusial, memastikan bahwa penelitian ini tertanam dalam kerangka kerja teoretis yang kokoh dan didukung oleh temuan penelitian terkini dari berbagai disiplin ilmu, seperti teori politik, sosiologi, dan ekonomi. Studi kasus akan memberikan dimensi nyata pada dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana fenomena ini termanifestasi dalam konteks riil. Wawancara dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan anggota masyarakat, diarahkan untuk memberikan perspektif langsung dan pemahaman mendalam tentang pengalaman mereka terkait dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial. Survei dan analisis kuantitatif akan memberikan gambaran umum

yang objektif terkait dengan distribusi kekuasaan politik dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, interaksi teknologi dan peran media massa telah menjadi elemen krusial dalam membentuk dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial. Peran teknologi, terutama media sosial, memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi sekaligus menciptakan tantangan baru dalam mengelola informasi dan memahami opini publik. Dalam dinamika kekuasaan modern, peran globalisasi juga tidak dapat diabaikan, karena proses globalisasi berdampak pada distribusi kekayaan dan kekuasaan di tingkat global, menciptakan konteks baru dalam memahami dan mengatasi kesenjangan sosial. Selanjutnya, partisipasi politik masyarakat menjadi elemen penting dalam membentuk dinamika kekuasaan. Pertanyaan etis dan praktis tentang sejauh mana masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik perlu dipahami dengan lebih baik.

Dalam konteks keberlanjutan, dinamika hubungan antar-kelompok dalam masyarakat juga memegang peran penting. Pertentangan antara kelompok etnis, agama, dan sosial seringkali memainkan peran sentral dalam membentuk kekuasaan dan kesenjangan sosial. Faktor historis dan warisan sejarah juga turut membentuk dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern, dan pemahaman mendalam terhadap keterkaitan ini penting untuk merumuskan solusi yang efektif.

Dalam pembahasan mengenai kebijakan pemerintah, penting untuk menjelaskan peran pembangunan kebijakan dalam merespons dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial. Bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif, serta sejauh mana implementasinya berdampak pada kesenjangan sosial, menjadi fokus utama dalam analisis ini. Akhirnya, evaluasi hasil analisis dan kesimpulan diperlukan untuk memberikan rekomendasi konkret untuk perubahan kebijakan dan inovasi. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang membentuk dinamika ini dapat membuka pintu untuk solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan, bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif di era politik modern yang terus berubah. Selanjutnya, perlu diperhatikan juga dampak partisipasi politik masyarakat dalam dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial. Tingkat partisipasi ini tidak hanya mencakup pemilu tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dalam kebijakan publik dan gerakan sosial. Pertanyaan etis terkait dengan seberapa inklusifnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik perlu diperdalam, bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan.

Efek globalisasi terhadap kesenjangan sosial juga membutuhkan sorotan khusus. Proses globalisasi ekonomi dan politik telah memberikan dampak signifikan pada pembagian kekayaan dan distribusi kekuasaan di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, analisis ini akan mengeksplorasi sejauh mana globalisasi berkontribusi pada kesenjangan sosial dan apakah terdapat upaya konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh fenomena ini.

Dalam konteks pembangunan kebijakan, perlu diperhatikan bahwa respons pemerintah terhadap dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial tidak hanya mencakup pembentukan kebijakan saja, tetapi juga implementasi dan evaluasi keberhasilannya.

Sejauh mana kebijakan dapat memberikan dampak positif pada kesenjangan sosial dan memitigasi ketidaksetaraan merupakan bagian integral dari analisis kebijakan publik.

Dalam menyimpulkan, rekomendasi untuk perubahan dan inovasi perlu didasarkan pada pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial yang telah dianalisis. Rekomendasi ini dapat mencakup perluasan akses partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi pemerintah, dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif. Pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas ini akan membantu membentuk langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem politik modern dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian tentang dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial dalam sistem politik modern merupakan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen dalam lingkungan politik saat ini. Pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif memberikan pemahaman yang komprehensif, memungkinkan identifikasi faktor-faktor kunci yang membentuk dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial.

Analisis literatur memberikan dasar teoretis yang kokoh, mencakup berbagai disiplin ilmu dan memastikan bahwa penelitian ini berada dalam konteks konseptual yang luas. Studi kasus dan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci memberikan dimensi praktis dan perspektif langsung terkait pengalaman individu dalam dinamika politik. Survei dan analisis kuantitatif memberikan gambaran umum yang objektif tentang distribusi kekuasaan politik dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Penting untuk mencermati peran teknologi, media massa, dan efek globalisasi dalam membentuk dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial. Interaksi kompleks antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok-kelompok sosial memunculkan tantangan dan peluang baru yang perlu diperhatikan dalam analisis ini. Partisipasi politik masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global, memainkan peran sentral dalam membentuk arah dan keberlanjutan dinamika politik.

Dalam menghadapi berbagai aspek dinamika tersebut, rekomendasi dapat mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi pemerintah, memperluas akses partisipasi masyarakat, dan mengkaji kembali kebijakan-kebijakan yang ada. Respons pemerintah terhadap dinamika kekuasaan dan kesenjangan sosial perlu diperkuat, termasuk evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana kekuasaan politik dan kesenjangan sosial terbentuk dan saling memengaruhi dalam sistem politik modern. Dengan memahami kompleksitas ini, diharapkan rekomendasi dan temuan penelitian dapat membuka jalan menuju perubahan positif, mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Dwiana, R. (2013). *RADIO KOMUNITAS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Kasus pada Radio Komunitas Perempuan Hapsari FM di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Deliana, M. *Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Organizational Culture as a Kind of Factor Employee's Performance*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Ritonga, J. S. (2016). *Designing Curriculum, Capacity of Innovation, and Performances: A Study on the Pesantrens in North Sumatra*. *Miqot*, 40(1), 154547.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Wahyudi, D. (2022). *BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital)*, 45.
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Yolanda, A., Nurismilida, K. W., & Wulansary, D. (2021). *The Effect of Miscommunication on the Quality of Employee Performance*.
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). *Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamsa Medan*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.

- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Kadir, A. (2017). *Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik*.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M., & Muda, I. (2019). *Reformasi Administrasi Dalam Perspektif Pelayanan Publik*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Matondang, A. (2007). *Pengaruh Kolom Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Waspada Terhadap Pembentukan Opini Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan Islam di Universitas Medan Area*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). *Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.

Tarigan, U. (2013). Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tarigan, U. (2012). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).